

## **ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PAJAK HOTEL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2000-2007**

Oleh :  
Tutik Lestariningsih<sup>1)</sup>



*ogyakarta Special Province is a tourist destination that has a cultural basis for the strong potential of natural supports. Since 2003 until 2007 Yogyakarta Special province was able to attract tourists visit an average of 4,363,770 annually. The number of tourist visits will increase local income tax revenues, especially hotels. This research was aimed identifying the factors influencing the hotel tax increment and their effects.*

*The study used the panel data from secondary data period 2000-2007 coming from the Central BPS, the Office of Financial Management and Regional Asset district / city, BPS of Yogyakarta Special Province, Tourism and Culture Office of Sleman Regency. The data was analyzed by using the panel data regression model with the dependent variable was the hotel tax and the independent variable were the GDP per capita, the number of hotel rooms and the number of tourists*

*The result of the regression analysis to this t test ( $\alpha = 0.05$ ) showed that the amount of GDP per capita and the number of tourists had individually positive and significant to the hotel tax, while the number of hotel rooms did not influence significantly. The F test ( $\alpha = 0.05$ ) showed the results that the independent variables influenced together and significantly to the dependent variable and 99.83 percentage independent variables could explain the variety of the dependent variable. Finally, the increase of PDRB per capita as 1 percent will increase the hotel tax income as 1.16 percent and the increase of the number of tourist of 1 percent will increase the hotel tax income as 0.84 percent.*

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Bahkan sektor ini diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu (Suwanto, 2004:35). Sektor pariwisata selama ini terlihat memberikan sumbangan yang terus meningkat bagi perekonomian negara. Perubahan situasi ekonomi yang

buruk tidak banyak mempengaruhi kepariwisataan Indonesia, karena itu pariwisata mulai diperhatikan dan dikembangkan menjadi sektor andalan yang diajukan sebagai salah satu pengganti ekspor migas sebagai penghasil devisa terbesar.

Peran pariwisata di daerah semakin meningkat sejak disyahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan

1. Tutik Lestariningsih, SP.,M.Ec.Dev., adalah alumni Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom sebagai akibat dijalankannya desentralisasi fiskal. Salah satu aspek penting yang terjadi akibat dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah kemampuan yang diberikan kepada daerah untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang sejalan dengan diamentemennya peraturan perundangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari berbagai jenis pajak yang diberlakukan untuk kota dan kabupaten, Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak yang dipertahankan dan potensial untuk dikembangkan.

Kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang mewujudkan suatu daerah mampu berotonomi,

artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kemandirian daerah yang dapat memacu pertumbuhan daerah, oleh karena itu, kemandirian harus diikuti oleh kemampuan keuangan daerah yang menyakinkan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar untuk menutup baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Sebagai wilayah budaya dan wilayah pariwisata, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang mempunyai basis budaya yang sangat kuat didukung potensi alamnya. Dilihat dari potensi pariwisata tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat kedua setelah Bali (<http://www/pemda-diy.go.id>).

Tabel 1.1  
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Menurut Kabupaten/kota, 2003 – 2007

No.	Kabupaten/ Kota	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Yogyakarta	352.571	375.808	1.135.438	803.564	1.355.136	0,62
2	Sleman	1.820.984	1.971.168	1.871.707	1.037.229	1.844.247	0,09
3	Bantul	1.556.885	1.537.352	1.467.552	884.024	1.049.394	-0,07
4	Kulon Progo	344.960	293.116	262.799	206.304	309.662	0,01
5	Gunung Kidul	190.333	180.554	224.604	213.128	530.329	0,41

Sumber : Badan Pariwisata Daerah Provinsi DIY, Laporan Statistik Kepariwisataaan Yogyakarta tahun 2007, 2008

Sebagai tujuan wisata, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berbenah untuk meningkatkan arus wisatawan, dengan berbagai potensi yang ada di masing-masing kabupaten/kota kunjungan wisatawan di DIY selalu meningkat seperti terlihat pada tabel 1.1. Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung pada masing-masing kabupaten/kota cukup memberikan gambaran tentang perkembangan kepariwisataan di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Hal ini diharapkan akan berdampak pada tingkat hunian hotel yang akan berdampak pula pada meningkatnya pajak di masing-masing kabupaten/kota.

## 1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan Perkembangan Pariwisata serta Pajak Hotel dan Restoran telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu baik dalam maupun luar negeri antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Penelitian-penelitian Mengenai Pariwisata dan Pajak Hotel

No.	Peneliti	Metode	Lokasi	Kesimpulan
1	Narja (1999)	Regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS)	Kota Gianyar	Variabel yang berpengaruh terhadap besarnya pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah wisatawan, Kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah dan PDRB per kapita.
2	Zega (2001)	Regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS)	Kabupaten Nias	PDRB per kapita, jumlah kamar hotel dan pemberlakuan system MAPADDA berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel
3	Fayissa, dkk (2007)	Regresi data panel	42 negara di Afrika	Penerimaan dari kontribusi pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Afrika.
4	Fan dan Oosterhaven (2005)	model input-output	China	Hasil penelitian 1,64 persen dari GDP, 1,4 persen penghasilan rumah tangga dan 1.01 persen dari lapangan kerja di China tergantung pada pengeluaran pariwisata internasional.
5	Coates, (2009)	Regresi data panel.	South Carolina	<i>Even Race at Darlington</i> dan <i>Foot ball game</i> memberikkan pengaruh yang signifikan terhadap pajak akomodasi
6	Tsounta, (2008)	Regresi data panel.	Eastern Caribbean Currency Union	GDP per kapita dan FDI berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kedatangan wisatawan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas adalah terletak pada waktu, lokasi, alat analisis dan variabel yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor perkembangan pariwisata yang mempengaruhi Pajak Hotel tahun 2000 – 2007.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan terhadap peningkatan pendapatan Pajak Hotel di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II . TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT ANALISIS**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau lingkup nasional pada suatu negara erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut (Yoeti, 1995:32). Lebih lanjut dikatakan bahwa, uang yang dibelanjakan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata atau negara yang mengembangkan pariwisata sebagai industri merupakan penerimaan bagi daerah tersebut. Penerimaan tersebut tidak hanya akan dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, tetapi juga pendapatan nasional serta penerimaan pajak. Dalam lingkup daerah, penerimaan yang dimaksud

adalah hasil pajak, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah serta lain-lain dari pendapatan yang sah.

Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya pada suatu daerah tujuan wisata yang sangat besar pengaruhnya bagi daerah-daerah yang memiliki berbagai potensi kepariwisataan. Pengeluaran wisatawan akan memberikan kemungkinan bertambahnya beraneka ragam jenis pungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam penerimaan pajak dan retribusi.

Menurut Soemitro (1992) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (lihat Mardiasmo 2006:1). Pajak Hotel menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Selanjutnya dalam pengertian pengeluaran, besar kecilnya pengeluaran tergantung pada besar kecilnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu

daerah semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran masyarakat, sehingga cara memenuhi kebutuhan pun meningkat seperti kegiatan mengunjungi restoran dan rumah makan ataupun menginap di hotel pada akhir pekan yang pada akhirnya akan meningkatkan pajak hotel, dengan kata lain semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah.

Irwan (2001) dalam penelitiannya menemukan PDRB per kapita dan kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Batam. Variabel bebas laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

Tsounta (2008) menganalisis di 6 kota Eastern Caribbean Currency Union selama tahun 1979 – 2005 dengan menggunakan data panel, hasilnya menunjukkan bahwa GDP per kapita dan FDI berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kedatangan wisatawan, selain itu peristiwa seperti badai dan serangan teroris berpengaruh negatif terhadap kunjungan wisatawan sedang permintaan pariwisata dipengaruhi juga oleh pertimbangan harga.

## **2.2 Landasan Teori**

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah tidak terlepas dari arah pembangunan nasional sehingga harus memperhatikan aspek pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Dalam perekonomian

modern peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar yakni peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Pemerintah Daerah akan dapat melaksanakan peran dan program-program yang direncanakan dengan adanya keuangan yang cukup.

Pemerintah dapat mengusahakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri bagi pembiayaan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan, seperti pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi. Menurut Mardiasmo dan Makfatih (2000:8) beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah antara lain; (1) kondisi awal suatu daerah, yakni keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah; (2) peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, dengan memperhatikan hal-hal: a) penambahan obyek dan subyek pajak atau retribusi; b) meningkatkan besarnya penetapan; c) mengurangi tunggakan; (3) perkembangan PDRB per kapita riil; (4) pertumbuhan penduduk; (5) tingkat inflasi; (6) penyesuaian tarif; (7) pembangunan baru; (8) sumber pendapatan baru; (9) perubahan peraturan.

Landasan hukum pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan

Undang-undang. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem pajak yang ideal dapat dilihat dengan indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas Manfaat, memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, apabila manfaat yang diperoleh oleh masyarakat jauh lebih besar dengan beban pajak yang mereka bayarkan maka *tax morality* dalam membayar pajak tetap tinggi.
2. Keadilan, dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara *horizontal* (artinya: beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama), adil secara vertikal (artinya: beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar).
3. Efisiensi ekonomi, pajak hendaknya mendorong penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi; memperkecil beban pajak bagi masyarakat.
4. Kemampuan melaksanakan, suatu pajak harus dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.
5. Kepastian sebagai sumber penerimaan daerah, harus jelas

kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, serta landasan hukum membayar pajak harus jelas.

Berkembangnya pariwisata akan berakibat ganda (*multiplier effect*) terhadap sektor lain, seperti bidang pertanian, peternakan, kerajinan rakyat, mebel, tekstil dan lain-lain kegiatan yang produknya diperlukan untuk menunjang perkembangan pariwisata khususnya hotel dan restoran (Spillane, 1987: 86). Daerah yang memiliki potensi kepariwisataan diharapkan memiliki penerimaan pajak hotel dan restoran yang akan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh banyak faktor. Peningkatan penerimaan pendapatan pajak hotel dapat dilakukan dengan salah satunya melalui peningkatan subyek dan obyek pajak, yang dimaksud subyek pajak pada pajak hotel adalah pengusaha hotel sedangkan obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sehingga dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan jumlah kamar hotel diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel.

Pajak hotel dan restoran sejak tahun 2000 dipilah menjadi pajak hotel dan pajak restoran, pemilahan ini merupakan penyesuaian terhadap Undang-undang No 34 Tahun 2000. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan pajak hotel lebih dominan dibanding pajak restoran, maka dalam penelitian ini dipilih pajak hotel. Variabel

yang diduga mempengaruhi peningkatan Pajak Hotel kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: PDRB per kapita, jumlah wisatawan dan jumlah kamar hotel.

### 2.3 Alat Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat analisis pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui pertumbuhan faktor-faktor yang diteliti dengan cara tahunan menurut Widodo (1990:36) sebagai berikut :

$$\Delta PDBx = \frac{\Delta PDBx - \Delta PDBx-1}{\Delta PDBx-1} \times 100 \%$$

Di mana :

$\Delta PDBx$  = Laju pertumbuhan ekonomi (*Rate of Growth*) PDRB

X = Tahun tertentu

X - 1 = Tahun sebelumnya

PDB = Produk Domestik Regional Bruto

Proporsi penerimaan dianalisis untuk melihat besarnya proporsi pajak hotel terhadap total pajak daerah dan PAD dengan menggunakan formula:

$$PX_1 = \frac{X_1}{Y_1} \times 100 \%$$

Di mana :

$PX_1$  = Proporsi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD pada tahun i

$X_1$  = jumlah pajak hotel pada tahun i

$Y_1$  = total penerimaan pajak daerah atau PAD tahun i

2. Untuk jawaban dari hipotesis digunakan alat analisis regresi data panel, yang merupakan gabungan antara data *time series* dengan data *cross section* (Widarjono, 2007: 250).

Model yang digunakan dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pajak hotel dapat dibuat model ekonometri sebagai berikut :

$$PH = f(PDRB_t, JKH_t, JW_t)$$

Adapun model regresinya sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Pajak hotel

$\beta_0$  = Konstanta / *Intercept*

$X_1$  = nilai PDRB per kapita

$X_2$  = jumlah kamar hotel

$X_3$  = jumlah wisatawan

i = Kabupaten/kota

t = waktu

Untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel dengan tiga uji yaitu: pertama uji statistik F digunakan untuk memilih antara *common effect* atau *Fixed effect*, kedua, uji *langrange multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara *common effect* atau *random*



effect, ketiga untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* digunakan uji Hausman (Widarjono, 2007: 258).

### BAB III. ANALISIS DATA

#### 3.1 Cara Penelitian

Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi data panel dengan menggunakan data sekunder yang meliputi Pajak Hotel, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten/kota, BPS Provinsi DIY, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: studi dokumenter (*documentary study*) dan studi kepustakaan (*library study*).

Penelitian dilakukan di kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurun waktu penelitian ini adalah 8 tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2007 yang dilakukan pada minggu pertama bulan Juli 2009.

#### 3.2 Hasil Analisis Data dan Pembahasan

##### 3.2.1 Analisis diskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh berhubungan dengan perkembangan pariwisata dalam hal ini PDRB per kapita, jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan serta pajak hotel dapat dianalisis sebagai berikut.

##### 3.2.1.1 Pertumbuhan Pajak Hotel

Secara absolute realisasi penerimaan pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 untuk semua kabupaten/kota seperti terlihat pada Tabel 3.1, sedangkan untuk penerimaan pajak hotel yang paling tinggi setiap tahunnya adalah Kota Yogyakarta dan terendah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Apabila dibandingkan rata-rata pertumbuhan dari kelima kabupaten/kota yaitu Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Kulon

Tabel 3.1  
Realisasi Pajak Hotel Kabupaten/kota  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2007

No.	Kabupaten/ Kota	Pajak Hotel (Rupiah)		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2000	2007	
1	Yogyakarta	5.013.228.653	11.402.753.105	20,57
2	Sleman	5.008.042.966	6.361.902.864	6,03
3	Bantul	14.828.490	22.056.190	17,17
4	Kulon Progo	2.019.880	9.503.708	80,72
5	Gunung Kidul	17.194.819	21.788.774	46,27

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten /kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, beberapa terbitan (data diolah).



Progo mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 80,72 persen dan paling rendah adalah Kabupaten Sleman 6,03 persen.

### 3.2.1.2 Pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita

Perkembangan PDRB per kapita menunjukkan bahwa daerah dengan PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2000 adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 8.832.290,- dan yang terendah adalah kabupaten Kulon Progo dengan PDRB per kapita sebesar Rp 3.208.920,-. Kondisi ini berubah pada tahun 2007, di mana Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan PDRB per kapita tertinggi yaitu sebesar Rp 10.857.920,- dan terendah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.845.010,- dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita juga paling rendah (3,05 persen per tahun). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang paling tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo sebesar 5,69 persen seperti terlihat pada Tabel 3.2.

### 3.2.1.3 Pertumbuhan jumlah kamar hotel

Perkembangan jumlah kamar hotel yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota secara absolut mengalami kenaikan dari tahun 2000 sampai dengan 2007, sedangkan untuk pertumbuhan rata-rata paling tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo dan terendah adalah Kabupaten Sleman. Pertumbuhan jumlah kamar hotel mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dan terjadi penurunan pada tahun 2006 untuk semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Sleman, seperti terlihat pada tabel 3.3 dan gambar 3.1.

### 3.2.1.4 Pertumbuhan jumlah wisatawan

Dilihat dari jumlah wisatawan yang menginap di hotel untuk kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2000 – 2007 mengalami kenaikan, sedangkan pertumbuhan jumlah wisatawan yang paling tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo dan

Tabel 3.2  
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten/kota  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2000 - 2007

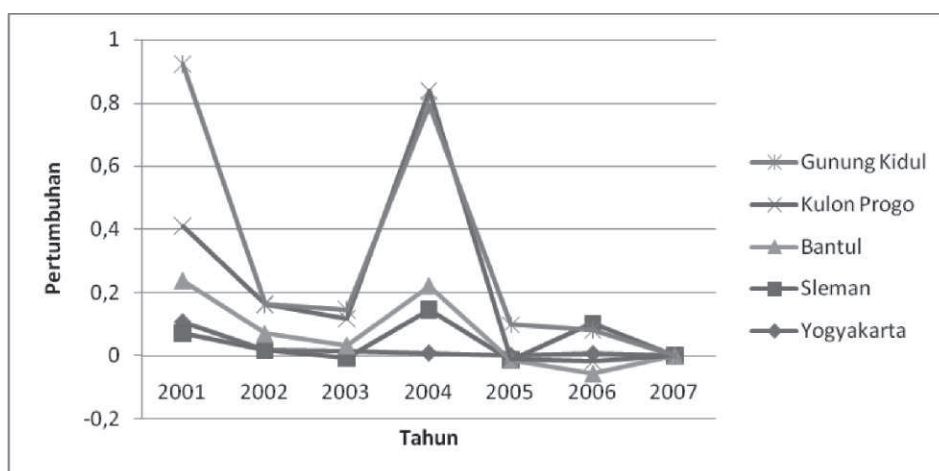
No.	Kabupaten/ Kota	PDRB per Kapita ( Rupiah)		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2000	2007	
1	Yogyakarta	8.832.290	10.587.920	3,74
2	Sleman	4.419.450	5.412.710	4,13
3	Bantul	3.309.020	3.845.010	3,05
4	Kulon Progo	3.208.960	4.239.950	5,69
5	Gunung Kidul	3.414.830	4.292.540	4,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten/Kota, beberapa terbitan (data diolah).

Tabel 3.3  
Jumlah Kamar Hotel Kabupaten/kota  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2000 - 2007

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kamar Hotel							
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Yogyakarta	6.343	7.022	7.152	7.258	7.322	7.329	7.380	7.380
2	Sleman	4.217	4.056	4.044	3.953	4.488	4.419	4.831	4.831
3	Bantul	1.734	2.028	2.138	2.226	2.399	2.403	2.027	2.027
4	Kulon Progo	47	55	60	65	105	105	109	109
5	Gunung Kidul	229	347	348	358	342	380	418	418

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten/Kota, beberapa terbitan (data diolah).



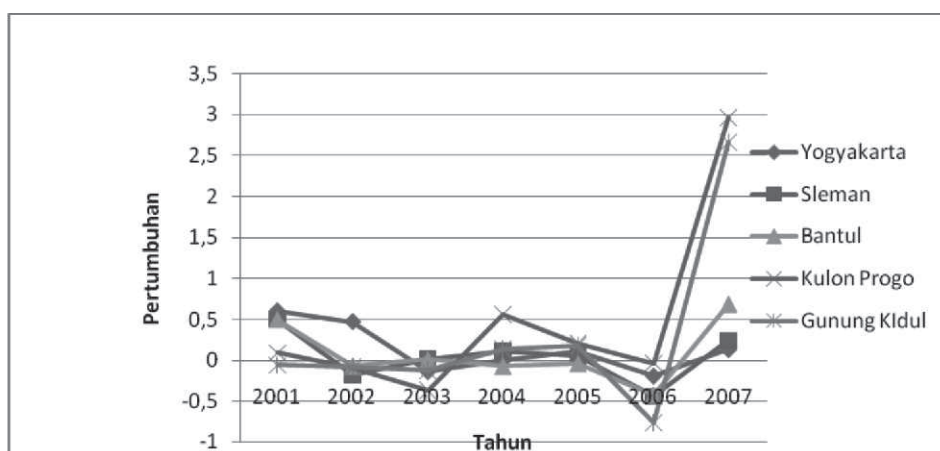
Gambar 3.1  
Pertumbuhan Jumlah Kamar Hotel Kabupaten/kota  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2000 - 2007

terendah adalah Kabupaten Sleman. Jumlah wisatawan mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dan terjadi penurunan pada tahun 2006 untuk semua kabupaten/kota seperti terlihat pada gambar 3.2 .

### 3.2.1.5 Kontribusi pajak hotel

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama

periode 2000-2007 dapat dilihat pada tabel 3.4. Selama periode penelitian tahun 2000-2007 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah terbesar adalah di Kota Yogyakarta kemudian Kabupaten Sleman. Pajak hotel di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul mempunyai kontribusi sedikit terhadap pajak daerah, hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan untuk ketiga kabupaten tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman.



Gambar 3.2  
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Kabupaten/Kota  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 200 - 2007

Tabel 3.4  
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-rata (%)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Yogyakarta	40,91	35,32	34,70	35,37	35,50	39,03	33,13	17,99	34,00
Sleman	52,16	39,62	34,90	34,13	30,15	30,31	25,70	22,72	33,71
Bantul	0,97	1,17	0,64	0,54	0,51	0,47	0,23	0,40	0,62
Kulon Progo	0,22	0,20	0,15	0,08	0,08	0,12	0,09	0,31	0,16
Gunung Kidul	2,86	2,63	0,00	1,67	1,46	1,61	0,29	1,07	1,45

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Laporan Realisasi Pendapatan Daerah, beberapa terbitan (data diolah)

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode pengamatan 2000-2007 untuk kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dilihat pada tabel 3.5. Kontribusi yang terbesar terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 18,76 persen sedangkan untuk Kabupaten Gunung Kidul mempunyai kontribusi yang paling rendah sebesar 0,02 persen. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten yang lain.

### 3.2.2 Analisis regresi

Untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik, dilakukan pengujian pemilihan model dengan menggunakan uji *Chow Test*, *LM Test* dan *Hausman Test*. Tabel 3.6 menunjukkan nilai statistik hasil uji-uji tersebut untuk menentukan model terbaik dari tiga pendekatan dalam analisis data panel, yaitu pendekatan *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian model yang menunjukkan bahwa *fixed effect* lebih baik dari

Tabel 3.5  
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	Tahun								Rata-rata (%)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Yogyakarta	22,33	20,03	18,78	17,28	18,03	20,17	15,096	17,99	18,76
Sleman	27,99	21,53	19,82	16,05	15,02	14,27	10,764	9,44	16,86
Bantul	0,21	0,17	0,14	0,11	0,12	0,09	0,050	0,07	0,12
Kulon Progo	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,010	0,05	0,02
Gunung Kidul	0,26	0,23	0,00	0,17	0,17	0,16	0,027	0,09	0,14

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Laporan Realisasi Pendapatan Daerah, beberapa terbitan (data diolah)

Tabel 3.6  
Hasil Pengujian Pemilihan Model untuk Regresi Data Panel

Uji	Nilai Hitung	Nilai Tabel*	Keterangan
Chow Test	19,7729	1% = 4,31 5% = 2,84	Ho ditolak, artinya model <i>fixed effect</i> lebih baik dibandingkan model <i>common effect</i>
LM Test	1,2704538	1% = 11,34 5% = 7,81	Ho tidak ditolak, artinya model <i>common effect</i> lebih baik dibandingkan model <i>random effect</i>

*common effect* dan *common effect* ternyata lebih baik dari *random effect*, maka dapat disimpulkan model data panel yang terbaik untuk penelitian ini adalah *fixed effect*.

Selanjutnya dalam rangka menghilangkan masalah *heteroskedastisitas* dengan menggunakan model *fixed effect* pada *intercept* dan dipilih *Cross section weight* (metode GLS). Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* hitung sebesar 1,667, sedangkan nilai kritis *D-Watson* pada  $\alpha$  5% adalah  $d_L = 1,338$  dan  $d_U = 1,659$  maka dapat disimpulkan nilai *D-Watson* hitung terletak pada daerah tidak mengandung *autokorelasi*. Mengenai masalah *multikolonieritas*, tanda yang paling jelas dari adanya gejala *multikolonieritas* yang ekstrim menurut Gujarati (2001: 166) adalah ketika koefisien determinasi ( $R^2$ ) sangat tinggi tapi tidak satupun

koefisien regresi signifikan secara statistik. Kemudian juga dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan masalah *multikolonieritas* adalah dengan menghubungkan data *cross section* dengan data urutan waktu (*pooling data*). Dalam penelitian ini hanya satu koefisien regresi yang menunjukkan keadaan tidak signifikan pada koefisien determinasi yang tinggi ( $adjusted R^2 = 0,9983$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa problem *multikolonieritas* yang serius tidak terjadi dan dengan demikian hasil analisis regresi ini dapat dipercaya untuk bahan interpretasi dan estimasi.

Pengujian terhadap koefisien regresi ditentukan dengan melihat tabel t distribusi normal pada  $\alpha = 0,05$ , jumlah sampel ( $n = 40$ ,  $df = (40-4=36)$  dan diperoleh nilai t tabel sebesar 2,021. Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung

Tabel 3.7  
Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Fixed Effect  
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Hotel

Variabel	Koefisien regresi	t hitung	Signifikansi	Keterangan
Ln PDRB per kapita	1,165922	2,507863	Signifikan	F hitung = 31.910,94
Ln jumlah kamar hotel	-0,186237	-0,842216	Tidak Signifikan	R <sup>2</sup> = 0,9983
Ln jumlah wisatawan	0,841298	11,71001	Signifikan	Adj R <sup>2</sup> = 0,9979 DW Stat = 1,667 T table = 2,021

dan koefisien regresi seperti diperlukan dalam tabel 3.7.

Hasil tersebut kemudian dilakukan uji statistik, dari hasil uji t tersebut diperoleh bahwa variabel Produk Domestik Bruto Regional per kapita, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel karena nilai t statistik masing-masing variabel tersebut lebih besar dari nilai t tabel (2,021). Pada variabel jumlah kamar hotel menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan negatif terhadap pajak hotel.

Dari hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* diketahui nilai F hitung yaitu 31.910,94, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,84 pada  $\alpha = 0,05$  sampel  $n = 40$  dan jumlah variabel bebas  $(k) = 3$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan secara serempak dan signifikan berpengaruh terhadap pajak hotel.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh dari hasil pengujian dengan pendekatan *fixed effect* adalah sebesar 0,9983. Hal ini menunjukkan bahwa 99,83 persen pajak hotel dipengaruhi oleh variabel-variabel dalam model yang meliputi jumlah

Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan sedangkan 0,17 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{LnY} = C + 1,165922 \text{ LnPDRB} - 0,186237 \text{ LnJKM} + 0,841298 \text{ LnJW}$$

$$T_{\text{stat}} = (2,507863) \quad (-0,842216) \quad (11,71001)$$

di mana Y adalah pajak hotel,  $X_1$  adalah jumlah PDRB per kapita,  $X_2$  adalah jumlah kamar hotel,  $X_3$  adalah jumlah wisatawan.

Variabel PDRB per kapita menunjukkan hubungan positif dengan pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana semakin besar PDRB per kapita maka nilai pajak hotel akan semakin besar pula. Hal ini sesuai dengan penelitian Irwan (2001) yang menyatakan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap Pajak hotel dan restoran di Kota Batam. Nilai koefisien sebesar 1,16 menunjukkan setiap kenaikan 1 persen PDRB per kapita maka pajak hotel mengalami

peningkatan sebesar 1.16 persen dengan asumsi variabel-variabel lain yang mempengaruhi adalah tetap.

Jumlah wisatawan menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, hal ini sejalan dengan temuan Silviana (2002) yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak hotel dan Restoran di Kota Bukit Tinggi. Nilai koefisien sebesar 0,84 menunjukkan setiap kenaikan 1 persen belanja jumlah wisatawan, akan meningkatkan pajak hotel masing-masing kabupaten/kota sebesar 0,84 persen dengan asumsi variabel-variabel lain yang mempengaruhi adalah tetap.

Koefisien regresi jumlah kamar hotel sebesar -0,186237 adalah tidak signifikan atau tidak berpengaruh secara nyata. Hal ini berarti bahwa peningkatan atau penurunan jumlah kamar hotel tidak akan berpengaruh pada pajak hotel, hal ini sesuai dengan penelitian Silviana (2002).

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian tentang Analisis Perkembangan Pariwisata terhadap Pajak Hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah kamar hotel dan jumlah wisatawan secara bersama-sama menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pajak hotel.
2. Produk Domestik Regional Bruto per kapita dan jumlah wisatawan secara

parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel.

3. Jumlah kamar hotel secara parsial menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pajak hotel.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka saran-saran yang dapat disampaikan dalam upaya meningkatkan pajak hotel Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membuat rencana program yang dapat menarik kunjungan wisatawan antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan fasilitas obyek wisata meliputi transportasi, telekomunikasi dan akomodasi seperti hotel dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan bagi para pengusaha dan masyarakat yang bergerak di bidang tersebut agar dapat meningkatkan mutu pelayanannya.
2. Meningkatkan kualitas program-program wisata yang memiliki daya saing dengan didasarkan pada budaya daerah sendiri seperti upacara-upacara tradisional yang meliputi: sekaten, garebeg, labuhan dan lain-lain serta atraksi wisata seperti sendratari Ramayana, wayang golek, wayang kulit sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk tinggal lebih lama.
3. Memperkenalkan alternatif tujuan wisata sebagai eksplorasi keunikan desa yang terpadu dengan kerajinan, makanan khas maupun budaya serta melestarikan dan mengembangkan seni budaya berbasis masyarakat pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2008, *Produk Domesik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2003-2007*, BPS Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2008, *Produk Domestik Bruto Kabupaten Bantul*, BPS Kabupaten Bantul, Bantul.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Provinsi DIY, *DIY Dalam Angka*, beberapa terbitan, BPS Provinsi DIY, Yogyakarta.
- Badan Pariwisata Daerah Provinsi DIY, 2008, *Laporan Statistik Kepariwisataaan Yogyakarta Tahun 2007*, Badan Pariwisata Daerah Provinsi DIY, Yogyakarta.
- Coates, Dennis, 2009, "Hotel Tax Collections and a Local Mega-Event", *International Assosiation of Sports Economists, January 2009*, Departemen of Economics, University of Maryland, Baltimore County.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah*, beberapa terbitan.
- Fan, Tianfu & Oosterhaven, Jan, 2005, "The Impact of International Taurism on the Chinese Economy", *Paper for the 15<sup>th</sup> International Input-Output Conference, Beijing, June 2005*, China.
- Fayissa, Bichaka, Nsiah, Christian and Tadasse, Badassa, 2007, "The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa", *Departemen of Economics and Finance Working Paper Series, August 2007*, Midlle Tennessee State University, Murfreesboro, U.S.A.
- Fitriana, 2002, *Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palu*, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan)
- Gujarati, Damador, 2001, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.
- <http://www.pemda-diy.go.id>
- Irwan, 2001, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Batam*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.



Mardiasmo dan Makhfatih, Akhmad, 2000, "Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang", *Laporan Penelitian*, PAU Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).

Narja, I Gusti Ketut, 1999, "Kinerja Pungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Tingkat II Gianyar 1993/1994–1997/1998", *Tesis S2*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).

Pendit S, Nyoman, 1995, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Pendit S, Nyoman, 2006, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Saleh, Samsubar, 2004, *Statistik Deskriptif*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Silvana, 2002 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Bukittinggi", *Tesis S2*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).

Spillane, J James, 1987, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta.

Suwantoro, Gamal, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 9, *Tentang Kepariwisataaan*, Tahun 1990

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22, *Tentang Pemerintah Daerah*, Tahun 1999

\_\_\_\_\_ ' Undang-Undang Nomor 25, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Tahun 1999

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 34, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Tahun 2000

Tsounta, Evridiki, 2008, "What Attracts Tourists to Paradise?", *International Monetary Fund*,

Widarjono, Agus, 2007, *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua. Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta.

Widodo, Suseno Triyanto, 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Yoeti. A, Oka, 1995, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa Bandung.

Yoeti. A, Oka, 1997, *Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata*, PT Pradya Paramita.

Zega, Fowuazisokhi, 2001, Peranan Pajak Hotel dalam Otonomi Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).